

POTENSI EKONOMI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UKM UNGGULAN DI KABUPATEN SEMARANG

Rusdarti

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
email: rusdarti@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the phenomenon of SMEs superior and superior product, superior type of SMEs superior product and formulating policy strategy, in accordance with the potential of SMEs in Ungaran, Semarang Regency. This research was conducted using the method of documentation with secondary data from the books in BPS and Bappeda Semarang Regency period 2004-2008. Method of assessment approaches and processes to find different types of SMEs and excellent potential in these areas would use a SWOT analysis method and Location Quotient (LQ). The results showed that: (1) Potential sectors that could be driving the manufacturing sector, in terms of small scale industries (SMEs) is a type of food and beverage industry, and traditional medicines. Processing industry is a sector basis and the biggest contributor to economic growth in the district of Semarang. Potential sectors that could be driving the manufacturing sector, in terms of small scale industries (SMEs) is a type of food and beverage industry, and traditional medicines. Processing industry is a sector basis and the biggest contributor to economic growth in the district of Semarang. (2) Policy strategy that can be applied based on the SWOT analysis are: (a) Strength Strategy Opportunity (SO), local product development, utilization of water resources potential to be a mineral water company's industrial sector, (b) Weakness Opportunity Strategy (WO), to realize the industrial area which mengutamakan local raw materials such as: industry tempeh, tofu, crackers, chips and other variations that do not rely on raw materials imported from abroad. Utilizing the barren land to build industrial park, (c) Strategy Treath Strength (ST), the industrial sector become a leading sector, cooperation with other regions in pemanfaatan pemanfaatan water resources and tourist villages, and (d) Strategies Treath Weakness (WT), improve facilities and infrastructure, improving workforce skills for small industries to maintain and or improve the quality of its products. It is suggested local government should remain small support industry to remain a leading sector in a way makes it easy for small industry in the necessary permits and acces capital and marketing and increasing skill of its workforce.

Keywords: potential sectors, superior product

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang terpusat dan tidak merata serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis

dan berkeadilan telah menghasilkan fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh. Rapuhnya fondasi perekonomian nasional telah mengakibatkan Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan serta menurunnya daya saing ekonomi nasional. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi adalah tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan per kapita riil yang berlangsung terus menerus yang berasal dari daerah tersebut dan prosesnya dinamis.

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Untuk itu,

pembangunan ekonomi rakyat seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional, karena tujuan pembangunan ekonomi rakyat sesuai dengan amanat konstitusi yaitu: meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi dalam sistem ekonomi nasional harus diarahkan kepada sistem ekonomi kerakyatan yang memberikan prioritas pembangunan ekonomi pada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Rencana kerja Pemerintah di bidang Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang memuat konsepsi penyelenggaraan negara yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat dalam rangka mewujudkan kekuatan ekonomi nasional melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat terutama Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Ekonomi Rakyat adalah kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat Indonesia, yang umumnya terdiri dari: koperasi, pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Rencana kerja pemerintah pada tahun 2009 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tinggal lima tahun lagi di tahun 2015 sesuai dengan tujuan *Millennium Development Goals (MDGs)*. *MDGs* yang dideklarasikan oleh PBB ini di Indonesia terancam gagal dengan kinerja pembangunan seperti yang telah berjalan. Masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia termasuk di daerah pada saat ini justru nampak semakin kompleks dan sulit untuk diselesaikan permasalahannya. Adanya krisis pangan dan lesunya ekonomi dunia termasuk kenaikan harga minyak saat ini juga mempersulit masalah-masalah tersebut. Selain itu, struktur fundamental sosial ekonomi daerah di Indonesia masih belum memiliki fondasi yang kuat untuk memacu daya dan pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Upaya meniadakan kemiskinan, mengurangi tingkat kematian, mencapai pendidikan dasar secara universal, menjamin kelestarian hidup dengan cara mengintegrasikan prinsip pembangunan berkesinambungan, mengurangi hingga setengah proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan perbaikan hidup 100 juta penduduk dunia yang hidup di daerah-daerah kumuh tidak saja

menjadi target bangsa Indonesia tetapi juga menjadi target dalam *Millennium Development Goals (MDGs)* sampai dengan tahun 2015. (Kompas, 2005).

Masalah pokoknya adalah mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun tingkat provinsi dan daerah yaitu kabupaten dan kota masih rendah belum sesuai dengan target atau tujuan pembangunan sehingga masih tetap rendah. Hal ini berdampak masih tetap banyaknya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Bagaimanakah cara memacu pertumbuhan ekonomi di daerah? Salah satu titik permasalahannya adalah belum diketemukannya jenis usaha rakyat (usaha kecil mikro dan menengah) unggulan dan produk unggulan yang potensial serta produktif untuk dikembangkan menjadi andalan di daerah tersebut. Pengembangan jenis UKM yang potensial dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selama krisis hingga saat ini UKM terbukti handal dan lebih tahan terhadap krisis karena sebagian terbesar bahan baku dari dalam negeri, lebih banyak menyerap tenaga kerja serta mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto baik di tingkat daerah maupun nasional. Pada era otonomi daerah paradigma dalam pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari kemajuan fisik yang diperoleh atau berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima. Keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dengan parameter yang lebih luas dan lebih strategis yang meliputi semua aspek kehidupan baik materiil maupun non materiil. Agar dapat memenuhi kriteria luas dan strategi tersebut, maka pelaksanaannya harus diawali berdasarkan prioritas dan pemilihan sasaran-sasaran yang mempunyai nilai strategis dan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan citra Kabupaten Semarang dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang.

Dengan berbasis pengembangan UKM potensial dan produk unggulan di Jawa Tengah pada umumnya dan di Ungaran Kabupaten Semarang pada khususnya. Hal inilah struktur fundamental ekonomi daerah dan Jawa Tengah akan semakin lebih kuat dan lebih tangguh, sehingga masalah gejala-gejala kemiskinan dan pengangguran akan lebih mudah teratasi dan diambil keputusan serta

kebijakan pembangunan melalui pemberdayaan dan potensi yang ada.

Masalahnya adalah tidak semua UKM yang ada di tiap daerah khususnya di Ungaran Kabupaten Semarang adalah potensial, dan masih banyak jenis UKM yang justru masih menghadapi kesulitan dan kendala untuk berkembang baik secara internal maupun eksternal UKM itu sendiri. Karena itulah perlu diadakan penelitian mengenai jenis-jenis UKM apakah yang potensial dan perlu untuk dikembangkan? Jenis UKM serta produk dan komoditas apa yang menjadi unggulan di Kabupaten Semarang sehingga dalam jangka panjang dapat dikembangkan untuk memperkuat daya saing serta memperkuat struktur ekonomi daerah? Bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan jenis UKM dan produk unggulan tersebut?

LANDASAN TEORI

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang terjadi terus menerus dan bersifat dinamis. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil yang diterima oleh penduduk. Menurut Todaro, (2000: 18) bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*); (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia; dan (3) meningkatnya kemauan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*). Pembangunan ekonomi daerah dan nasional sedang dan akan menghadapi perubahan fundamental yang berlangsung sangat cepat dan perlu kesiapan terutama pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UKM). Usaha kecil dan menengah atau *Small and Medium Enterprise (SME)* secara umum memiliki karakteristik yang hampir sama antara satu negara dengan negara lain, namun dari segi patokan/ standar ukuran berada antara satu negara dengan negara lain, seperti: aset maksimal, omset usaha, permodalan, jumlah tenaga kerja, gaya manajemen yang dilaksanakan, dan sebagainya. Meskipun kriteria umum UKM hampir sama antara satu negara dengan negara lain tetapi karena kondisi eksternal maupun internal perusahaan berbeda-beda

antara satu negara dengan negara lain maka ukuran UKM tidak dapat digeneralisasi.

Peranan UKM sangat besar dalam Perekonomian Nasional (Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 2004) antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong munculnya kewirausahaan domestik dan sekaligus menghemat sumberdaya negara;
2. Menggunakan teknologi padat karya, sehingga dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan yang disediakan oleh perusahaan skala besar;
3. Dapat didirikan, dioperasikan dan memberikan hasil dengan cepat;
4. Pengembangannya dapat mendorong proses desentralisasi inter-regional dan intra-regional, karena usaha kecil dapat berlokasi di kota-kota kecil dan pedesaan;
5. Memungkinkan tercapainya obyektif ekonomi dan sosial-politik dalam arti luas.

Pentingnya UKM dalam perekonomian nasional akan meningkatkan komitmen dan pemihakannya dalam pembangunan nasional. Hal ini didukung oleh pranata konstitusi dan aturan pelaksanaannya (GBHN, UU Usaha Kecil, UU Perkoperasian, dan UU Propenas) yang memberikan prioritas pembangunan ekonomi pada UKM dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dan beragam sumber daya yang ada harus mampu menaksir sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1998: 108).

Kebijakan Optimal Prioritas Sektoral

Arsyad (1999:108), menyatakan bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan

dan sumber daya fisik secara lokal (daerah) seperti UKM. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan seluruh sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah dengan mengembangkan basis ekonomi sektoral dan kesempatan kerja yang beragam. Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan prioritas sektoral dalam menentukan yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Hingga saat ini, belum ada dasar teori yang baku dalam mengembangkan UKM termasuk skala industri kecil di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, dapat diketahui fenomena yang terjadi bahwa industri kecil yang berkembang bukan karena fasilitas dari pemerintah setempat melainkan karena kreativitasnya.

Strategi Pembangunan

Dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah tidak ketinggalan membangun yang sifatnya berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dibedakan menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, tetapi dengan menjaga fungsi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada tidak menurun, tanpa digantikan oleh sumberdaya yang lainnya. Sedangkan dalam arti luas pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan meskipun terdapat penyusutan cadangan sumberdaya alam dan meburuknya lingkungan, akan tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain baik oleh manusia maupun sumber daya modal atau kapital.

Dalam kaitannya dengan strategi pembangunan, Suparmoko, 2002: 99 menyatakan sebelum strategi pembangunan disusun, diketahui terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan daerah dalam pengembangan perekonomiannya. Dengan menge-

tahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah maka akan lebih tepat dalam penyusunan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah tersebut.

Strategi Pengembangan Usaha Kecil

Pengembangan dunia usaha khususnya industri kecil merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena dapat memberdayakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan peluang lapangan kerja, daya tahan industri kecil merupakan cara terbaik untuk mengembangkan perekonomian daerah yang sehat. Selanjutnya Suyatno, 2000: 146, menyatakan bahwa, pertumbuhan industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga menghasilkan ekspor. Dalam kaitannya dengan pengembangan usaha kecil dapat dilihat dari teori basis. Menurut Glasson (1990: 64) basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu: (1) sektor basis adalah sektor yang mengekspor barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masuk dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan, (2) sektor bukan basis yaitu sektor yang menjadikan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Suryana (2001:73) bahwa teori *dynamic* dan teori *resource-based strategy* sesuai jika diterapkan pada pengembangan UKM di Indonesia. Model dasar *resource-based strategy* adalah strategi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya internal yang superior (potensial) untuk menciptakan kemampuan inti (keunggulan) dalam menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Akibatnya, keberadaan UKM tidak tergantung pada strategi kekuatan pasar melalui monopoli dan fasilitas pemerintah. Dalam strategi ini, UKM mengarah pada skill khusus secara internal yang bisa menciptakan

produk inti yang unggul untuk memperbesar pangsa pasar manufaktur. Teori tersebut dapat memanfaatkan sumber daya lokal. UKM termasuk industri kecil mampu berkembang bukan karena fasilitas dari pemerintah melainkan karena kreativitasnya. Dalam prakteknya, para pelaku UKM cenderung menggunakan model perilaku pasar yang bersifat non-price competition melalui pengembangan pola dan desain produk unggulan baru yang lebih inovatif dan sulit ditiru dari pada model persaingan harga. Implikasi penerapan model non-price competition sering disertai dengan kalimat “tuna satak bathi sanak” yang dalam jangka panjang ungkapan tersebut ternyata menjadi modal sosial yang efektif dalam meningkatkan keuntungan.

Kluster industri termasuk UMKM mengidentifikasi bahwa jenis baru daerah industri telah muncul. Teori ini dikenal *New Industrial District* (NID). Dalam Teori daerah industri tradisional mengabaikan kerja sama antara industri besar dan menengah (IBM) dengan industri kecil kerajinan rumah tangga (IKRT). Teori ini menilai kisah sukses kluster IKRT (UKM) terlalu tinggi, dan menilai terlalu rendah kekuatan perusahaan besar, serta gagal dalam membedakan tahap-tahap industrialisasi awal dan lanjut (Kuncoro, 2007:104).

Ada tiga jenis *industrial district*, menurut Kuncoro, (2007) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kawasan industri yang terspesialisasi (*specialized industrial district*). Sesuai dengan garis teori tersebut, selanjutnya kluster yang terspesialisasi merupakan konsentrasi geografis subsector manufaktur yang sama. Model ini cocok untuk kluster industri di Italia.
2. Daerah industri diturunkan dari model kompleks industri yang muncul dari Teori klasik dan neoklasik. Ciri utama dalam model ini adalah ada sekumpulan hubungan yang dapat diidentifikasi dan stabil, serta minimisasi biaya transaksi dan biaya spasial. Model ini dikembangkan di Amerika dan Jepang.
3. Model jaringan sosial (*social network model*). Model ini dikembangkan literatur sosiologis dan neo institusionalis. Kluster ini hanya menggambarkan respon ekonomi terhadap peluang yang tersedia dan melengkapi, tetapi tingkat kelekatan dan integrasi sosial yang tidak biasa. Karena

adanya bentuk modal sosial, yang dihasilkan dan dilestarikan melalui kombinasi sejarah sosial dan tindakan bersama yang menerus, merupakan faktor kunci, selanjutnya kluster ini sering disebut kluster dewasa.

Teori *industrial district* lebih menonjolkan pada daerah-daerah industri di Eropa dan Amerika. Teori ini telah mengalami evolusi yang cukup lama dan berakar dalam konteks tradisional, institusional, serta kultural bukan didirikan melalui intervensi pemerintah. Nampaknya berdasarkan ciri-ciri utama tersebut dan berdasarkan analisis situasi serta keberadaan industri distrik di daerah Ungaran khususnya dan Kabupaten Semarang pada umumnya lebih condong dan cocok dengan dasar teori *industrial district* bentuk ini. Teori *industrial district* tersebut Nampak memiliki daya penjas yang lebih baik dalam menganalisis kluster UKM disbanding dengan model teori *new economic geography* (NEG). Karena dalam Teori NEG, sebenarnya mengabaikan peran dan keberadaan industri kecil rumah tangga (IKRT) dalam kluster industri secara regional, sehingga ciri-ciri dan peran dari UKM menjadi kurang diperhatikan.

Pada era otonomi daerah paradigma dalam pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari kemajuan fisik yang diperoleh atau berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima. Keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dengan parameter yang lebih luas dan lebih strategis yang meliputi semua aspek kehidupan baik materiil maupun non materiil. Agar dapat memenuhi kriteria luas dan strategi tersebut, maka pelaksanaannya harus diawali berdasarkan prioritas dan pemilihan sasaran-sasaran yang mempunyai nilai strategis dan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan citra Kabupaten Semarang dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang.

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah, pembangunan ekonomi wilayah hingga saat ini masih menghadapi masalah, diantaranya adalah keterbelakangan ekonomi. Upaya masyarakat dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya belum berhasil sepenuhnya, hal ini disebabkan karena sebagian penduduk masih terbelakang secara ekonomi, artinya kualitas penduduk adalah rendah yang tercermin dalam produktivitas yang rendah.

Padahal tingkat produktivitas berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan (Adisasmita, 2005:202). Sektor ekonomi unggulan pada dasarnya adalah motor penggerak perekonomian di suatu wilayah. Melalui sektor ekonomi unggulan, suatu wilayah secara tidak langsung menggantungkan diri pada kontribusi hasil penjualan dari sektor ekonomi unggulan tersebut bagi pembentukan PDRB wilayahnya digunakan sebagai salah satu sarana pelaksanaan pembangunan daerah. Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat bahkan pendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2001:99). Sebelum sebuah strategi pengembangannya disusun sebaiknya diketahui dahulu kekuatan dan kelemahan daerah. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan tersebut akan lebih tepat dalam menyusun strategi guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan diketahuinya tujuan dan sasaran maka strategi pengembangan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi siapa saja yang melaksanakan usaha di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam mempersiapkan strategi ada langkah-langkah yang dapat ditempuh:

1. mengidentifikasi sektor-sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor.
2. mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor penyebabnya.

3. mengidentifikasi sumber daya yang siap digunakan untuk mendukung pengembangan.
4. dengan menggunakan pembobotan terhadap variabel kekuatan dan kelemahan maka akan ditemukan potensi yang menjadi unggulan dan patut dikembangkan.
5. menentukan strategi untuk mengembangkan sektor yang dapat menarik sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian dapat berkembang (Suparmoko, 2000:100).

Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan bahwa sektor unggulan di wilayah inilah Industri, Pertanian dan Pariwisata (INTANPARI). Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat daerah. Namun demikian belum diketahui secara pasti produk dan komoditas serta jenis usaha termasuk jenis UKM apa yang dapat menjadi unggulan di daerah tersebut adalah belum jelas dan perlu diadakan penelitian dan dikaji lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Desain dan metode pendekatan, pengkajian serta proses untuk mencari jenis UKM unggulan dan komoditas potensial di daerah tersebut digunakan metode analisis SWOT dan *Location Quotient* (LQ). Model analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diperkenalkan oleh Rangkuti tahun 1997. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Matrik Analisis SWOT

Faktor Eksternal	OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
Faktor Internal	COMPARATIVE ADVANTAGE (SO)	MOBILIZATION (ST)
STRENGTHS (S)	INVESTMENT DIVESMENT (WO)	DAMAGE CONTROL (WT)
WEAKNESSES (W)		

Sumber: Rangkuti (1997)

Analisis Location Quotient (LQ)

Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis dan mana yang bukan sektor basis. Formulasi LQ secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.

$$LQ = \frac{S_i / S}{N_i / N}$$

Keterangan:

LQ = Nilai Location Quotient

S_i = PDRB sektor I di Ungaran

S = PDRB total di Ungaran

N_i = PDRB sektor I di Kabupaten Semarang

N = PDRB total di Kabupaten Semarang

Apabila hasil perhitungan menunjukkan $LQ > 1$ berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk dikembangkan, sedangkan $LQ < 1$ berarti bukan sektor basis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Kabupaten Semarang

1) Ketenagakerjaan

Berdasarkan data dari BPS (2009), mata pencaharian penduduk di Kabupaten Semarang pada umumnya masih bekerja sebagai petani, baik petani penggarap maupun petani pemilik lahan, yaitu sebesar 37,27% dari penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja. Hal ini sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar masih merupakan lahan pertanian. Jika pada tahun 2006 terdapat 11.305 pencari kerja dari segala tingkat pendidikan, maka pada tahun 2007 pencari kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebanyak 13.244 orang.

2) Kemiskinan

Secara umum kondisi keluarga miskin ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal (1) memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, pendidikan dan kesehatan; (2) melakukan kegiatan usaha produktif; (3) menjangkau sumber daya sosial dan ekonomi; (4) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin. Banyaknya jumlah keluarga miskin di Kabupaten Semarang pada umumnya disebabkan oleh rendahnya

pendapatan, minimnya pemenuhan dan akses pelayanan sarana dan prasarana terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, penambahan jumlah penduduk yang tidak diiringi oleh peningkatan kualitas hidup, rendahnya daya beli masyarakat dan lain-lain. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka pemberdayaan dan perwujudan kemandirian masyarakat antara lain penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat miskin.

3) Ekonomi

a) *Kondisi dan Struktur Ekonomi*

Perekonomian Kabupaten Semarang tahun 2005 tercatat 1,46% mengalami penurunan namun di tahun 2006 mengalami peningkatan kembali yaitu 3,11%. Apabila kita menggunakan rata-rata, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang selama periode 2004 – 2008 adalah sebesar 3,37%. Laju perekonomian Kabupaten Semarang selama periode 2004 – 2008 mengalami fluktuasi yang cukup berarti. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2008 yang mencapai 4,72%. Kabupaten Semarang memiliki kontribusi PDRB cukup besar, hal ini terlihat dari presentase tiap-tiap sektor pada tahun 2004 – 2008. Untuk mengetahui sumbangan dari masing-masing sektor dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa Sektor yang tidak mengalami peningkatan kontribusi PDRB adalah sektor pertanian. Sektor ini mengalami penurunan pada tiap-tiap tahun sejak tahun 2004. Sektor lain seperti sektor listrik dan gas, sektor bangunan, dan sektor perdagangan juga mengalami penurunan yaitu sektor bangunan dan sektor perdagangan mengalami penurunan pada tahun 2005. Sedangkan sektor listrik dan gas mengalami penurunan di tahun 2007 setelah tahun sebelumnya mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebesar 1,26% menurun menjadi 0,84% namun penurunan pada sektor listrik dan gas tersebut tidak begitu berarti karena dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2007 meningkat.

b) *Investasi*

Investasi merupakan salah satu indikator perekonomian daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Semarang pada

Tabel-1. Distribusi PDRB Kabupaten Semarang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004 – 2008 (dalam persen)

Lapangan usaha	2004	2005	2006	2007	2008
Pertanian	14,76	14,1	13,30	13,25	13,14
Penggalian	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
Industri	45,99	46,33	47,05	46,81	46,85
Listrik, gas dan air	0,78	0,80	1,26	0,84	0,84
Bangunan	3,58	3,63	3,79	3,77	3,77
Perdagangan	22,01	21,85	21,78	21,87	21,79
Angkutan, kom	1,87	1,96	2,08	2,11	2,20
Keu, persewaan	2,95	3,19	3,15	3,22	3,28
Jasa-jasa	7,94	8,11	7,92	8,01	8,01
PDRB Kabupaten Semarang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BAPEDA Kabupaten Semarang, 2009

tahun 2005 terdapat investasi 1 proyek PMA, 1 proyek PMDN dan 302 investasi non fasilitas dengan nilai total investasi 1 proyek PMA, 1 proyek PMDN dan 601 investasi non fasilitas dengan nilai sebesar Rp 219.973.218.603,00.

c) *Industri*

Sektor industri merupakan potensi ekonomi yang telah berkembang di Kabupaten Semarang. Industri unggulan yang mendominasi di Kabupaten Semarang adalah industri makanan dan minuman yang berbasis bahan baku, industri obat-obatan, industri tekstil dan garmen yang secara umum nilai produksinya di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

d) *Pariwisata*

Potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang adalah objek wisata alam, budaya dan lain-lain yang menarik untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Pariwisata merupakan salah satu dari 3 sektor unggulan Kabupaten Semarang selain industri dan pertanian. Tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Semarang diantaranya sebagai berikut: Penggaron Hills Joglo Villa, Tirta Argo, Semirang, Blater, Candi Gedongsongo, Bandungan, Palagan Ambarawa, Museum KA, Benteng Williem II, Bukit Cinta Muncul, Tirta Muncul, Rawa Pening, Rawa Permai, Pasar Kriya, Kebun Tlogo, Senjoyo, Umbul Songo dan Kopeng.

e) *Pertanian*

Sektor yang dominan dalam mendukung perekonomian Kabupaten Semarang adalah Pertanian. Data penggunaan lahan di Kabupaten Semarang pada tahun 2008 menunjukkan adanya konversi lahan sawah lebih kurang seluas 6 Ha. Keadaan ini berdampak juga terhadap berkurangnya luas panen padi untuk masa panen selama tahun 2008. Tetapi secara akumulatif produksi padi pada tahun 2008 mengalami peningkatan.

f) *Perdagangan*

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong perkuatan struktur dan perekonomian daerah serta merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar kedua. Pada tahun 2006 kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten adalah sebesar 21,78% menurun namun kemudian meningkat kembali pada tahun 2007 sebesar 21,78% dan menurun lagi pada tahun 2008 sebesar 21,79%.

Analisis Potensi Sektor Ekonomi, Keterkaitan Wilayah dan Pengembangan Sektor Potensial

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakan yang termasuk ke dalam sektor basis (basic economy) atau berpotensi ekspor dan manakah yang bukan sektor basis (non basic sector). Apabila hasil perhitungannya menunjukkan angka lebih dari satu ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut

merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut bukan sektor basis. Hasil perhitungan LQ Kabupaten Semarang selama 5 tahun terakhir (tahun 2004 – 2008) selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat teridentifikasi sektor-sektor yang merupakan sektor-sektor basis maupun sektor non basis. Kabupaten Semarang mempunyai tiga sektor basis, sektor tersebut yaitu sektor industri pengolahan dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,327 sehingga sektor ini merupakan sektor basis dengan indeks rata-rata terbesar. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor basis terbesar kedua dengan indeks LQ rata-rata sebesar 1,034; sektor ketiga, yaitu sektor listrik, gas dan air yang memiliki nilai rata-rata sebesar 1,006. Hal ini menunjukkan ketiga sektor tersebut merupakan sektor basis. Sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan, dan sektor non basis itu sendiri adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang diperlukan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan.

Sektor-sektor basis yang terdapat pada Kabupaten Semarang tersebut menggambarkan bahwa

sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang. Atas dasar pemahaman di atas, sektor ini merupakan sektor yang potensial karena sektor ini sudah mampu memenuhi kebutuhan di daerahnya bahkan yang berpotensi ekspor. Terdapat 6 sektor yang merupakan sektor non basis selama periode 2004 – 2008 yaitu pertanian dengan rata-rata LQ 0,660; pertambangan dan penggalian dengan rata-rata LQ 0,091; bangunan dengan rata-rata LQ 0,669; pengangkutan dan komunikasi dengan rata-rata LQ 0,416; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan rata-rata LQ 0,882; dan sektor jasa-jasa dengan rata-rata LQ sebesar 0,789. Meskipun sektor basis merupakan sektor yang paling potensial untuk dikembangkan dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang, akan tetapi kita tidak boleh melupakan sektor non basis, karena dengan adanya sektor basis tersebut maka sektor non basis dapat dibantu untuk dikembangkan menjadi sektor basis baru.

Analisis SWOT untuk Menentukan Sektor Potensial Ekonomi

Analisis SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis internal dan eksternal, yaitu (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat) dari faktor-faktor tersebut sehingga dapat diperoleh beberapa alternatif strategi yang berpengaruh untuk pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi saat ini seperti yang telah dijelaskan dalam gambaran Kabupaten Semarang di atas dan

Tabel-2. Hasil Analisis Indeks Location Quotient (LQ) Kabupaten Semarang Tahun 2004 – 2008

Lapangan usaha	Tahun					Rata-rata
	2004	2005	2006	2007	2008	
Pertanian	0,702	0,665	0,636	0,644	0,656	0,660
Pertambangan dan penggalian	0,110	0,117	0,114	0,106	0,009	0,091
Industri pengolahan	1,437	1,430	1,460	1,464	1,465	1,327
Listrik, gas dan air bersih	1,025	1,026	0,984	1,001	0,995	1,006
Bangunan	0,669	0,662	0,681	0,673	0,663	0,669
Perdagangan, hotel dan restoran	1,028	1,047	1,036	1,036	1,023	1,034
Pengangkutan dan komunikasi	0,389	0,408	0,426	0,427	0,434	0,416
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,819	0,898	0,889	0,898	0,906	0,882
Jasa-jasa	0,793	0,806	0,791	0,782	0,773	0,789

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah (diolah)

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Semarang selama 25 tahun ke depan yaitu 2005 – 2030 yang diperoleh dari BAPEDA Kabupaten Semarang, maka

dapat diidentifikasi faktor-faktor lingkungan, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut.

a. Analisis SWOT Aspek Internal

Tabel-3. Analisis SWOT Faktor-Faktor Strategi Internal

Faktor-faktor	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan			
1. Letak Kabupaten Semarang yang strategis	0,041	2	0,082
2. Penduduk dalam jumlah besar sebagai sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah	0,046	2	0,092
3. Sektor industri yang memberikan sumbangan terbesar dalam perekonomian Kabupaten Semarang	0,131	4	0,524
4. Wilayah yang memiliki sumberdaya air yang melimpah	0,155	4	0,620
5. Komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan dalam proses pembangunan daerah	0,045	3	0,135
6. Kaya akan objek wisata	0,133	4	0,532
Kelemahan			
1. Kondisi geografis di Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran yang berpotensi rawan bencana	0,023	1	0,023
2. Beberapa wilayah kecamatan berpotensi erosi dan tanah longsor	0,123	3	0,369
3. Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi	0,143	4	0,572
4. Adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah mengakibatkan potensi disintegrasi daerah	0,018	1	0,018
5. Apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal cenderung menurun	0,027	2	0,054
6. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana umum, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman secara umum masih rendah	0,115	3	0,345
Total	1		1,531

b) Analisis SWOT Aspek Eksternal

Tabel-4. Analisis SWOT Faktor-Faktor Strategi Eksternal

Faktor-faktor	Bobot	Rating	Skor
Peluang			
1. Tingginya minat investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Semarang berpotensi berkembangnya kawasan industri sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat	0,117	4	0,468
2. Adanya semangat global untuk “kembali ke alam” maka kondisi geografis Kabupaten Semarang di antaranya Gunung Ungaran, Telomoyo dan Gunung Merbabu memiliki peluang pengembangan pertanian, hutan lindung dan wisata	0,015	1	0,015
3. Dibukanya AFTA membuka peluang ekspor dan peningkatan daya saing produk lokal	0,142	4	0,568
4. Terbukanya iklim usaha dapat mendorong peningkatan lapangan kerja sektor informal	0,032	2	0,064
5. Tingginya minat investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Semarang berpotensi berkembangnya kawasan industri sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat	0,101	4	0,404
6. Penggunaan anggaran dalam penyalahgunaan kekuasaan tuntutan peraturan Perundang-undangan terhadap terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat menekan kebocoran	0,075	3	0,225
Ancaman			
1. Dampak globalisasi menimbulkan penurunan nilai-nilai moral masyarakat	0,146	1	0,146
2. Krisis ekonomi global menyebabkan turunnya nilai ekspor yang berdampak pada pengurangan jumlah produksi dan tenaga kerja	0,132	1	0,132
3. Gencarnya budaya asing yang masuk sebagai perkembangan teknologi informasi, dalam beberapa hal bertentangan dengan nilai budaya lokal	0,037	3	0,111
4. Adanya wacana dan rencana pemekaran kabupaten/ kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang	0,049	3	0,147
5. Adanya kompetisi antara daerah baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan pusat bisnis berpengaruh terhadap minat investor	0,027	4	0,108
6. Pemanfaatan potensi sumber daya alam Kabupaten Semarang oleh daerah lain tenpat kompensasi kepada daerah mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan	0,127	1	0,127
Total	1		1,06

Sumber: RPJP Kabupaten Semarang, 2009 yang diolah

Dalam strategi yang dikembangkan melalui SWOT pada strategi strength opportunity (SO) nampak bahwa pengembangan perekonomian di Kabupaten Semarang atau daerah tersebut, untuk industri kecil makanan dan minuman dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Perkembangannya sangat pesat yang dapat memperkuat struktur perekonomian daerah dengan menempatkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung potensi sumberdaya alam (SDA), dan sektor lainnya yang terkait. Dalam kaitannya dengan SWOT pada strategi ST dapat dijelaskan Kabupaten Semarang dalam memperkuat struktur perekonomian daerah dengan menempatkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung potensi sumber daya alam (SDA), sektor pertanian dan sektor pariwisata dalam arti luas dapat bersaing di pasar global. Sektor pertanian dan pariwisata bukan merupakan sektor basis karena $LQ < 1$, walaupun dalam slogan atau motto INTANPARI yang meliputi industri, pertanian dan pariwisata hanya sektor industri yang merupakan sektor basis baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian bukan berarti pertanian dan pariwisata tidak diperhatikan, sektor pertanian diperoleh $LQ < 1$ atau sebesar 0,660., sementara itu sektor pariwisata atau jasa LQ sebesar 0,789. Menurut teori basis ekonomi, sektor ini bukan merupakan sektor basis karena sektor pertanian bukan faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran diperoleh hasil analisis LQ sebesar 1,034 berdasarkan teori basis ekonomi sektor ini merupakan sektor basis karena $LQ > 1$ dan sektor ini merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dengan demikian sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan melakukan perubahan peraturan dan kebijakan untuk dapat membangun kondisi yang kondusif dan aman, sehingga usaha dalam sektor ini berjalan lancar dan menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Secara keseluruhan sektor ini merupakan sektor basis kedua setelah industri pengolahan, kemudian yang termasuk sektor basis ketiga adalah listrik, gas dan air bersih. Untuk sektor lain yang dapat dikembangkan di daerah ini adalah sektor yang menurut analisis LQ mendekati angka

satu adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan LQ sebesar 0,882, kemudian sektor jasa-jasa termasuk di sini adalah pariwisata dengan LQ sebesar 0,789.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kecenderungan fenomena industri kecil (UKM) di Kabupaten Semarang pada industri pengolahan. Industri kecil mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan peluang kerja yang jumlahnya relatif besar dan memberdayakan masyarakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
2. Sektor potensial yang dapat menjadi sektor penggerak adalah industri pengolahan, dalam kaitan dengan industri kecil (UKM) adalah jenis industri makanan dan minuman, kemudian obat-obatan tradisional. Industri pengolahan merupakan sektor basis dan penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi.
3. Strategi kebijakan yang dapat diterapkan berdasarkan analisis SWOT adalah:
 - a. Strategi Strength Opportunity (SO), pengembangan produk lokal, pemanfaatan sumber daya air.
 - b. Strategi Weakness Opportunity (WO), dengan mewujudkan kawasan industri yang mengutamakan bahan baku lokal seperti: industri tempe, tahu, krupuk, kripik dan variasi lainnya yang bahan bakunya tidak mengandalkan import dari luar negeri. Memanfaatkan lahan tandus untuk membangun kawasan industri.
 - c. Strategi Strength Treath (ST), sektor industri dijadikan *leading sector*.
 - d. Strategi Weakness Treath (WT), meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan skill tenaga kerja bagi industri kecil untuk menjaga dan atau meningkatkan kualitas produknya.

Saran

1. Pemerintah daerah harus tetap memacu sektor industri unggulan yang menjadi basis adalah makanan dan minuman serta obat-obatan, pada

industri tersebut agar menjadi *leading sector* dengan cara memberikan kemudahan bagi industri kecil dalam pengurusan perijinan maupun akses permodalan dan pemasaran serta peningkatan skill tenaga kerjanya.

2. Dengan slogan INTANPARI dan ternyata sektor pertanian merupakan sektor bukan basis perlu adanya peningkatan dalam sektor pertanian dengan melalui berbagai cara dengan menerapkan strategi kebijakan yang ada dan seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam sektor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta
- BPS. 2009. Kabupaten Semarang.
- Boediono. 1990. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Glasson, John. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Penerjemah Paul Sitohang. Jakarta: LPFEUI
- Kementrian KUKM. *Rencana Strategis Koperasi dan UKM 2001-2010*. Tersedia Online: www.depkop.go.id. Diakses Tanggal 27 Desember 2009.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomi Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mujib, Saerofi. 2005. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Semarang: Pendekatan Model Basis Ekonomi dan SWOT*. *Laporan penelitian, tidak dipublikasikan*. Semarang: FE UNNES.
- Rangkuti, Freddy. 1997. *Analisis SWOT. Analisis Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suparmako. 2001. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Suryana. 2001. *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan (Problematika dan Pendekatan)*. Jakarta: Salemba Empat
- Todaro, Michael.P. 1998. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Wahab, Abdul Solichin. 2004. *Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara